

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pertukaran informasi masa ini mengalami yang amat pesat yang dirasakan terutama dalam menyebabkan lingkungan berubah pada era globalisasi ini. Bagian yang saling berangkaian dan berhubungan merupakan suatu sistem untuk menggapai suatu tujuan (Andi, 2017, hlm. 3). Informasi juga hal yang berarti bagi setiap instansi dalam memperlancar kegiatan setiap hari untuk membuat suatu keputusan. Pemakaian teknologi dan informasi adalah untuk mempercepat, mempermudah dan suatu efisiensi pekerjaan yang dilakukan secara manual oleh tenaga manusia. Namun pada dasarnya pengembangan teknologi atas pemanfaatan sistem kerja yang berjalan dalam suatu entitas harus sesuai dan tepat dengan tujuan yang hendak akan diraih. Jika tidak, maka akan sangat mungkin yang terjadi justru sebaliknya, yaitu pemborosan atau dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam konsep sistem informasi akuntansi diawali dengan input data yang kemudian di proses dan akan menghasilkan suatu output bagi pengguna informasi. Untuk mencapai suatu tujuan, sistem memerlukan suatu input dari pengguna komposisi. Input tersebut akan diselesaikan menjadi suatu pembatasan sebagai bahan dasar untuk pengerjaan data. Operasi input oleh pemakai sistem rata-rata disebut sebagai pencetus sistem. Tanpa adanya pencetus, sistem tersebut tidak akan beredar. Pencetus sistem dapat berupa orang, alat, atau komposisi lainnya yang terpadu. Sesudah komposisi tersebut memperbolehkan data input dari pemakai, maka sistem akan mengoperasikan data tersebut sesuai dengan instruksi yang sudah ditaruh di dalam sistem. Kemudian sistem akan menyampaikan output dari hasil pengerjaan data yang selesai di input oleh pemakai.

Setiap instansi atau perusahaan di dalamnya terdapat sumber daya manusia atau para pekerja dan karyawan. Para pekerja dan karyawan merupakan hal terpenting didalam suatu instansi atau perusahaan karena telah memberikan fikiran dan tenaga terkait dengan operasi suatu persahaan untuk mencapai tujuan perusahaan atau instansi pemerintahan tersebut. Tanpa adanya karyawan maka

tidak akan terlaksana dan tidak akan berjalannya suatu tujuan tersebut. Karyawan yang sudah memberikan fikiran dan tenaganya dapat diapresiasi dengan diberinya imbalan jasa yaitu gaji. Imbalan jasa merupakan sebuah balas jasa yang pasti diberikan oleh setiap instansi atas kinerja yang telah dihasilkan oleh karyawan. Pemberian gaji karyawan yang sesuai dengan kinerja dapat meningkatkan kelayaitasan karyawan terhadap instansi atau perusahaan. Berdasarkan kinerja karyawan yang baik maka dapat memotivasi dalam bekerja dengan perbedaan pemberian gaji. Pemberian gaji juga merupakan pengeluaran rutin setiap bulannya oleh suatu instansi yang sifatnya tetap dan pokok.

Peraturan Pemerintah berdasarkan Nomor 23 Pasal 1 Tahun 2005 (Lampiran 1), imbalan kerja yang diberikan berwujud uang yang konsisten setiap bulannya yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana yang dimaksud dengan memperhitungkan nilai jabatan yang diterima oleh pegawai, yang dituangkan dalam level jabatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Pembayaran gaji bagi instansi pemerintah merupakan pembayaran yang dapat terjadi risiko adanya kecurangan di satuan kerja. Untuk itu perlu adanya perhatian dan pengawasan terhadap sistem penggajian.

Pada Sekretariat Jenderal di Biro Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terdapat fungsi Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang mengurus belanja pegawai negeri sipil yang salah satunya yaitu penggajian pegawai. Prosedur yang dilakukan dengan landasan standar yang telah ditetapkan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan mengacu pada Peraturan Pemerintah berdasarkan Nomor 30 Tahun 2015 untuk diterapkan dalam satuan kerja di dalam instansi pemerintah. Setiap pekerjaan dan tanggung jawab akan menerima imbalan jasa yang setimpal untuk pegawai negeri sipil. Prosedur penggajian pegawai yang diawali dengan input data lalu diproses dalam suatu aplikasi yang kemudian menghasilkan suatu output. Prosedur penggajian pegawai pemerintah menggunakan suatu aplikasi yang bernama Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) yang dimana aplikasi tersebut memiliki data pegawai yang valid dan lengkap. Data tersebut dibuat oleh data pusat dan diperoleh berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan secara resmi oleh instansi karena adanya suatu perubahan terhadap pegawai. Data tersebut digunakan untuk proses pencairan gaji

seorang pegawai negeri yang telah terdaftar di data pusat pemerintah. Setelah diproses akan menghasilkan suatu output seperti gaji pegawai setiap bulannya.

Mekanisme penggajian pada lembaga instansi seperti di Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berlainan dengan sistem penggajian pada perusahaan-perusahaan pada lazimnya yang mengarah komersil. Lembaga Instansi mengarah pada kawasan penyajian kepada pemenuhan jasa, sedangkan lembaga komersil mengarah kepada keuntungan atau penerimaan laba. Dalam prosedur penggajian pada Sekretariat Jenderal yang dikelola oleh bagian PNBPN atau (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mulai dari Input di Aplikasi sampai adanya Surat Perintah Pencairan Dana.

Berdasarkan uraian diatas bahwa sistem informasi membutuhkan suatu tahapan-tahapan yang bermula dari adanya input, mengalami proses dan menimbulkan output. Input merupakan suatu tahapan awal dalam menjalankan sistem informasi dengan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa data-data yang di input itu *valid* dan lengkap. Setelah menerima data input, maka akan diproses data tersebut dalam suatu program yang bernama Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP). Pengolahan data yang sudah input kemudian akan memberikan output dari hasil. Output yang ditimbulkan berbentuk hal yang diinginkan oleh pemakai. Penulis melakukan Tugas Akhir dengan tugas untuk melakukan prosedur penggajian pegawai pemerintah pegawai negeri sipil pada Sekretariat Jenderal di Biro Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu, laporan Tugas Akhir difokuskan pada penjelasan mengenai aktivitas prosedur penggajian pegawai pemerintah dengan status pegawai negeri sipil.

## **I.2 Tujuan Penulisan**

Laporan Tugas Akhir ini berisikan penjabaran topik yang diambil dari pengalaman selama menjalankan Tugas Akhir pada Sekretariat Jenderal di Biro Keuangan yang terkait dengan pelajaran yang telah ditempuh selama dibangku kuliah. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Tujuan Umum
  - a. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar ahli madya dan syarat kelulusan Diploma Tiga jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
  - b. Untuk menerapkan dan mengimplementasikan materi didalam perkuliahan dengan pengaplikasiannya dalam sistem yang diimplementasikan pada suatu perusahaan melalui Tugas Akhir.
2. Tujuan Khusus
  - a. Untuk memahami bagaimana prosedur penggajian yang diterapkan pada Sekretariat Jenderal di Biro Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui unsur-unsur pembentuk dalam gaji induk penghasilan serta potongan gaji bulanan Pegawai Negeri Sipil.
  - c. Untuk memahami *Flowchart* dalam pembayaran gaji induk bulanan hingga adanya pencairan gaji pada pegawai setiap bulannya.

### 1.3 Manfaat

Penulis berharap dengan tujuan dilaksanakannya Tugas Akhir adapun manfaat yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu, meningkatkan bakat dan daya pemikiran ilmiah serta kreatifitas berdasarkan ilmu yang didapat pada saat di bangku kuliah khususnya berkaitan dengan prosedur penggajian Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Secara Praktik
  - a. Bagi Sekretariat Jenderal

Sebagai bahan masukan dan sebagai evaluasi dari standar yang sudah ditetapkan berdasarkan praktek yang berlangsung dalam proses penggajian pegawai negeri sipil yang berlaku dalam Sekretariat Jenderal.

b. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan konektifitas serta menambah pengalaman bagi penulis dalam praktik langsung mengenai tata cara pembayaran gaji pegawai negeri sipil